

Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia: Kajian Historis dari Era–Pra Kolonial Hingga Reformasi

Nurfadillah, Siti Nur Hidayah, Idrus L

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

* Correspondence e-mail; la636879@gmail.com, sitihurhidayah@gmail.com,
idruslatif.iainbone@gmail.com

Article history

Submitted: 2026/03/01; Revised: 2026/04/11; Accepted: 2026/06/11

Abstract

This study examines the historical periodization of Islamic education in Indonesia from the pre-colonial era to the Reformation era. This study is motivated by the dynamics of Islamic education development, which has constantly changed along with social, political, and cultural developments in each historical period. This study aims to analyze the development of Islamic education and the factors influencing changes in the system, institutions, and policies of Islamic education in Indonesia. This study uses a qualitative approach with library research. Data were obtained through documentation studies from various sources, such as books, scientific journal articles, and official documents relevant to the research topic. Data analysis techniques were descriptive-analytical through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that Islamic education in Indonesia developed dynamically and adaptively to social and political changes in each historical period. In the pre-colonial era, Islamic education developed through mosques, surau (Islamic boarding schools), and Islamic boarding schools (pesantren). During the colonial period, Islamic education experienced both marginalization and institutional modernization. Meanwhile, in the Reformation era, Islamic education was strengthened through educational decentralization policies, the transformation of IAIN into UIN, and formal recognition of Islamic boarding schools through national regulations.

Keywords

Islamic Education, Historical Periodization, Islamic Boarding Schools, Madrasahs, Islamic Education Reform



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu institusi sosial-keagamaan tertua, paling berkelanjutan, dan memiliki pengaruh signifikan dalam perjalanan sejarah bangsa. Sejak periode pra-kolonial hingga era Reformasi, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga menjadi arena interaksi politik, sosial, dan budaya yang

berlangsung secara dinamis. Berbagai lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, surau, langgar, hingga perguruan tinggi keagamaan Islam yang berkembang menjadi IAIN/UIN, memiliki peran penting dalam pembentukan akidah, akhlak, identitas keislaman, serta kaderisasi pemimpin masyarakat dan bangsa (Simamora et al.2026;Setyawan et al. 2025). Di samping itu, pendidikan Islam juga menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari dominasi sistem pendidikan kolonial yang bercorak sekuler, proses integrasi dalam sistem negara pascakemerdekaan, modernisasi pada masa Orde Baru, hingga dinamika demokratisasi dan desentralisasi pada era Reformasi.

Dalam ranah akademik, pendidikan Islam di Indonesia telah menjadi objek kajian dari berbagai perspektif, seperti sejarah, sosiologi, politik, dan pedagogi. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan berfokus pada periode tertentu, misalnya masa kolonial (Fakhriansyah 2019; Rohani et al. 2022). masa pendudukan (Agustang et al.2023; Amelia et al.2026). ataupun era Orde Baru dan Reformasi (Hafidha et al. 2024; Yuningsih 2015). Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi yang mendalam terhadap periode yang diteliti, keterkaitan historis antarfase perkembangan pendidikan Islam belum banyak dianalisis secara sistematis. Akibatnya, kesinambungan historis pendidikan Islam di Indonesia sebagai suatu proses yang utuh dan berkelanjutan masih sulit dipahami secara komprehensif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Kajian mengenai transformasi pesantren dari pola tradisional menuju modern menunjukkan adanya kemampuan adaptasi lembaga pendidikan Islam terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas keislamannya (Ardiant et al. 2023). Penelitian terkait perkembangan madrasah pada masa kolonial menegaskan bahwa kemunculan madrasah merupakan bentuk resistensi sekaligus adaptasi terhadap sistem pendidikan Barat yang sekuler (Fakhriansyah 2019). Selain itu, kajian mengenai transformasi IAIN menjadi UIN pada era Reformasi memperlihatkan adanya upaya integrasi antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan umum dan sains modern (Nurhidaya et al. 2022; Haqqi et al. 2024). Penelitian lain mengenai kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru juga menunjukkan adanya relasi yang kompleks antara kontrol negara dan otonomi lembaga pendidikan Islam (Hamzah 2014; Yuningsih 2015).

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang cukup signifikan dalam literatur yang tersedia. Pertama, masih terbatas kajian

yang menyajikan periodisasi sejarah pendidikan Islam secara komprehensif, mulai dari masa pra-kolonial hingga era Reformasi, dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Kedua, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan atau kebijakan semata, tanpa mengkaji resistensi dan adaptasi sebagai benang merah yang menghubungkan setiap periode perkembangan. Ketiga, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menyoroti kemampuan pendidikan Islam di Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya di tengah tekanan politik dan ideologis, sekaligus bertransformasi menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Kesenjangan penelitian tersebut penting untuk dikaji lebih lanjut karena pemahaman yang parsial terhadap sejarah pendidikan Islam berpotensi menghasilkan interpretasi yang tidak utuh mengenai posisi dan perannya dalam sistem pendidikan nasional. Tanpa pendekatan historis yang menyeluruh, karakteristik khas pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam hal kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan identitas keislaman, akan sulit dipahami secara mendalam. Selain itu, keterbatasan pemahaman historis juga dapat menghambat penyusunan kebijakan pendidikan Islam yang berorientasi jangka panjang dan berbasis pada sejarah panjang pembentukan institusi (*institution building*) yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan unsur kebaruan (*novelty*) dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan periodisasi historis yang komprehensif, mencakup masa pra-kolonial (abad ke-7 hingga akhir abad ke-15), kolonial Belanda (1602–1942), pendudukan Jepang (1942–1945), masa kemerdekaan dan Orde Lama (1945–1966), Orde Baru (1966–1998), hingga era Reformasi (1998–sekarang). Kedua, penelitian ini menitikberatkan pada dua tema utama yang menjadi benang merah sepanjang perjalanan sejarah pendidikan Islam, yaitu: (1) resistensi terhadap dominasi sistem sekuler dan kebijakan politik negara, serta (2) adaptasi terhadap modernisasi, perubahan sosial, dan kebijakan pendidikan nasional. Ketiga, penelitian ini tidak hanya menyajikan uraian historis, tetapi juga analisis kritis mengenai proses negosiasi identitas antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, antara tradisi dan modernitas, serta antara otonomi lembaga pendidikan dan kontrol negara.

Objek penelitian ini adalah periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia dengan fokus pada perkembangan lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, surau, langgar, IAIN/UIN, dan majelis taklim, termasuk kebijakan pendidikan Islam serta transformasi kurikulum dan metode pembelajaran pada

setiap periode sejarah. Penelitian ini berargumentasi bahwa pendidikan Islam di Indonesia merupakan institusi yang dinamis, adaptif, dan memiliki daya resistensi tinggi, sehingga mampu bertahan di tengah berbagai tekanan politik dan ideologis sekaligus berkembang menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam membangun pemahaman yang komprehensif mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti, praktisi pendidikan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan masa kini, tetapi juga berakar pada sejarah panjang pembentukan institusi pendidikan Islam di Indonesia.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian berorientasi pada pengkajian konsep, teori, dan data historis mengenai perkembangan pendidikan Islam di Indonesia melalui berbagai sumber literatur ilmiah. Fokus penelitian ini adalah periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari era pra-kolonial hingga era Reformasi. Adapun lokus penelitian berada pada berbagai literatur dan dokumen ilmiah yang membahas perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Populasi penelitian meliputi seluruh literatur yang berkaitan dengan sejarah pendidikan Islam, sedangkan sampel penelitian berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang dipilih berdasarkan relevansi serta kredibilitas sumber.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang memiliki kesamaan tema pembahasan.

FINDINGS AND DISCUSSION

Era Pra-Kolonial: Fondasi Pendidikan Islam (Abad ke-7 – Akhir Abad ke-15)

Masuknya Islam ke Nusantara merupakan proses historis yang berlangsung secara bertahap melalui jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan

wilayah Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan asal-usul kedatangan Islam di Nusantara. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13. Sementara itu, teori Arab berpendapat bahwa Islam telah masuk langsung dari Jazirah Arab sejak abad ke-7 melalui hubungan perdagangan maritim yang intensif. Di sisi lain, teori Persia menekankan adanya pengaruh budaya dan tradisi Islam Persia yang terlihat dalam beberapa praktik keagamaan masyarakat Muslim Nusantara. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai sumber kedatangan Islam tersebut, sebagian besar sejarawan sepakat bahwa Islam mulai memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Nusantara pada periode abad ke-13 hingga abad ke-15 (Simamora et al., 2026).

Seiring dengan berkembangnya pengaruh Islam, lahirlah berbagai bentuk pendidikan Islam yang berfungsi sebagai sarana penyebaran ajaran agama sekaligus pembentukan karakter masyarakat Muslim. Pada tahap awal, pendidikan Islam diselenggarakan secara sederhana dan belum memiliki sistem yang formal maupun terstruktur sebagaimana lembaga pendidikan modern saat ini. Kegiatan pembelajaran berlangsung di surau, masjid, dan berbagai pusat kegiatan keagamaan yang tersebar di tengah masyarakat. Melalui pendekatan pembelajaran yang berbasis tradisi lisan dan hubungan interpersonal yang kuat antara guru dan murid, lembaga-lembaga tersebut menjadi media efektif dalam menanamkan nilai-nilai keislaman, membentuk akhlak, serta mentransmisikan pengetahuan agama kepada generasi berikutnya. Pendidikan pada masa ini tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga diarahkan untuk membentuk pribadi yang mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks sosial masyarakat setempat (Setyawan et al., 2025).

Dalam perkembangan selanjutnya, pesantren muncul sebagai lembaga pendidikan Islam yang paling dominan dan menjadi ciri khas pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai asal-usul pesantren, baik sebagai hasil adaptasi dari sistem pendidikan Hindu-Buddha maupun sebagai inovasi yang berkembang secara mandiri dalam tradisi Islam, pesantren tetap diakui sebagai institusi pendidikan Islam yang autentik dan memiliki akar yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Ardianti et al., 2023). Pada masa pra-kolonial, pesantren memainkan peran sentral dalam mencetak

kader ulama, penyebar agama, serta pemimpin masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ajaran Islam.

Kurikulum pesantren pada masa tersebut berfokus pada kajian ilmu-ilmu keislaman klasik yang bersumber dari kitab-kitab berbahasa Arab. Materi yang diajarkan meliputi fikih, ushul fikih, tafsir Al-Qur'an, hadis, tasawuf, serta berbagai ilmu pendukung seperti nahwu dan sharaf yang diperlukan untuk memahami teks-teks keagamaan. Sistem pembelajaran yang diterapkan umumnya menggunakan metode sorogan dan bandongan atau wetonan. Dalam metode sorogan, santri secara individual membaca dan menjelaskan isi kitab di hadapan kiai untuk memperoleh koreksi dan bimbingan langsung. Sementara itu, metode bandongan dilakukan dengan cara kiai membacakan, menerjemahkan, dan menjelaskan isi kitab kepada sekelompok santri secara bersama-sama. Melalui metode tersebut, proses transmisi ilmu berlangsung secara intensif dan berkesinambungan dari generasi ke generasi. Selain itu, hubungan antara kiai dan santri dibangun atas dasar penghormatan, keteladanan, dan kedekatan emosional yang kuat, sehingga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai moral Islam (M. Sirojuddin et al., 2025).

Perkembangan pendidikan Islam semakin pesat ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri dan berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Kesultanan-kesultanan seperti Demak, Mataram, Banten, dan Ternate memberikan dukungan yang besar terhadap penyebaran Islam dan pengembangan lembaga pendidikan keagamaan. Para sultan umumnya menjalin hubungan erat dengan para ulama dan memberikan ruang yang luas bagi perkembangan kegiatan pendidikan Islam. Banyak ulama yang diangkat sebagai penasihat kerajaan sekaligus pemimpin lembaga pendidikan yang bertugas membina kehidupan keagamaan masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak hanya menjadi sarana dakwah, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam membangun legitimasi politik dan memperkuat identitas keislaman masyarakat.

Tokoh-tokoh seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan pendidikan Islam pada masa tersebut. Mereka tidak hanya dikenal sebagai penyebar agama Islam melalui pendekatan dakwah yang adaptif terhadap budaya lokal, tetapi juga sebagai pendidik yang mendirikan dan mengembangkan berbagai pusat pembelajaran Islam. Melalui aktivitas pendidikan yang mereka lakukan, nilai-nilai Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat tanpa menimbulkan konflik budaya yang berarti. Oleh karena itu, pendidikan Islam pada masa awal Nusantara menjadi fondasi penting

bagi terbentuknya tradisi keilmuan Islam yang terus berkembang dan bertahan hingga masa modern (Susmihara, 2018).

Era Kolonial Belanda: Resistensi dan Adaptasi (1602 – 1942)

Masa kolonial menjadi salah satu periode penting yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Kedatangan pemerintah kolonial Belanda melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada awal abad ke-17 membawa perubahan mendasar dalam sistem sosial, politik, dan pendidikan masyarakat Nusantara. Pemerintah kolonial memperkenalkan model pendidikan Barat yang bercorak sekuler dan berorientasi pada kepentingan administrasi kolonial. Akibatnya, pendidikan Islam yang sebelumnya berkembang secara mandiri melalui pesantren, surau, dan masjid mengalami marginalisasi secara bertahap. Lembaga pendidikan Islam tidak memperoleh dukungan yang memadai dari pemerintah kolonial dan sering kali dipandang sebagai institusi yang berada di luar sistem pendidikan resmi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial dengan pendidikan Islam yang berkembang di tengah masyarakat (Rohani et al., 2022).

Pada awal abad ke-20, pemerintah Belanda menerapkan Politik Etis atau Ethical Policy yang secara formal bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui program edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Kebijakan ini memang membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, namun pendidikan yang dikembangkan tetap berorientasi pada kebutuhan kolonial. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah diarahkan untuk mencetak tenaga kerja terdidik yang dapat mengisi berbagai posisi birokrasi dan administrasi pemerintahan kolonial. Sistem pendidikan tersebut terdiri atas berbagai jenjang, mulai dari Sekolah Desa dengan masa belajar tiga tahun, Sekolah Kelas Dua selama tiga tahun, Sekolah Kelas Satu selama lima tahun, hingga sekolah lanjutan yang mengajarkan ilmu pengetahuan modern dengan perspektif Barat. Meskipun memberikan kesempatan pendidikan yang lebih besar kepada masyarakat, sistem tersebut tidak memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan pendidikan Islam sehingga posisi lembaga pendidikan Islam tetap berada di luar arus utama kebijakan pendidikan kolonial (Fakhriansyah, 2019).

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, pendidikan Islam justru menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup kuat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya pendidikan, berbagai lembaga pendidikan Islam mulai melakukan pembaruan untuk menjawab tantangan zaman.

Transformasi pendidikan Islam dari sistem tradisional menuju sistem yang lebih modern mulai terlihat sejak akhir masa kolonial. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut aspek kurikulum, tetapi juga mencakup metode pembelajaran, manajemen kelembagaan, serta tata kelola pendidikan secara keseluruhan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan surau yang sebelumnya menggunakan metode pembelajaran tradisional berbasis halaqah mulai mengadopsi sistem kelas, jadwal pembelajaran yang teratur, serta struktur organisasi yang lebih sistematis (Azzahra et al., 2025; Iqbal et al., 2023).

Modernisasi pendidikan Islam semakin berkembang dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan yang berupaya mengintegrasikan ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu pengetahuan umum. Integrasi ini dilakukan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam praktiknya, berbagai lembaga pendidikan Islam mulai menerapkan penggunaan ruang kelas, bangku, papan tulis, sistem evaluasi pembelajaran, serta pembagian waktu belajar yang lebih terstruktur. Kurikulum yang sebelumnya berfokus pada kajian kitab-kitab klasik kemudian diperluas dengan memasukkan mata pelajaran umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa, dan berbagai disiplin ilmu lainnya yang dianggap penting untuk menunjang kemajuan umat Islam (Azzahra et al., 2025).

Transformasi pendidikan Islam juga tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai organisasi Islam yang muncul pada awal abad ke-20. Organisasi-organisasi tersebut menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang utama perjuangan mereka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Muslim. Melalui pendirian sekolah, madrasah, serta penguatan jaringan pesantren, organisasi-organisasi Islam berupaya menciptakan sistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan modernitas tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Upaya ini mendorong lahirnya berbagai model pendidikan Islam yang lebih terorganisasi, memiliki standar pengelolaan yang lebih baik, serta mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kehadiran organisasi-organisasi tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat proses modernisasi pendidikan Islam di Indonesia (Iqbal et al., 2023).

Secara keseluruhan, perkembangan pendidikan Islam pada masa kolonial menunjukkan adanya proses transformasi yang berlangsung secara bertahap dan dinamis. Pendidikan Islam yang awalnya bersifat lokal, berbasis tradisi lisan, serta belum memiliki standar kelembagaan yang jelas, secara perlahan berkembang menjadi sistem pendidikan yang lebih formal, terstruktur, dan adaptif terhadap

perubahan sosial. Transformasi tersebut tidak hanya memperkuat posisi pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terbentuknya sistem pendidikan Islam modern yang terus berkembang hingga masa pascakemerdekaan. Dengan demikian, sejarah pendidikan Islam pada masa kolonial tidak hanya menggambarkan tantangan akibat marginalisasi oleh pemerintah kolonial, tetapi juga menunjukkan kemampuan lembaga pendidikan Islam dalam melakukan inovasi dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman (Azzahra et al., 2025).

Era Pendudukan Jepang: Periode Singkat Namun Bermakna (1942 – 1945)

Masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 hingga 1945 setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada Maret 1942 dalam Perang Dunia II. Jepang datang dengan ideologi Hokko Ichiu atau “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” yang didukung slogan “Asia untuk Asia”. Melalui konsep tersebut, Jepang berusaha menampilkan diri sebagai pembebas bangsa-bangsa Asia dari kolonialisme Barat, meskipun pada kenyataannya Indonesia tetap berada di bawah kontrol dan eksploitasi Jepang. Berbagai kebijakan yang diterapkan, termasuk di bidang pendidikan, diarahkan untuk mendukung kepentingan politik dan militer Jepang dalam memenangkan Perang Pasifik (Agustang et al., 2023).

Dalam bidang pendidikan, Jepang menerapkan sistem yang berbeda dari Belanda dengan tujuan membentuk loyalitas masyarakat serta menyiapkan tenaga yang dapat mendukung kebutuhan perang. Seluruh aktivitas pendidikan, termasuk pendidikan Islam, dipengaruhi oleh kepentingan ideologi dan militer Jepang. Meskipun demikian, pemerintah Jepang menunjukkan sikap yang relatif lebih akomodatif terhadap umat Islam dibandingkan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu kebijakan penting adalah perubahan Kantoor Voor Islamistische Zaken menjadi Shumubu atau Kantor Urusan Agama yang dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy’ari. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada ulama untuk terlibat dalam pengelolaan urusan keagamaan dan pendidikan Islam.

Pemerintah Jepang juga memberikan ruang bagi pesantren dan madrasah untuk tetap menjalankan kegiatan pendidikan. Berbagai lembaga pendidikan Islam memperoleh perhatian dan dukungan sebagai bagian dari upaya Jepang mendapatkan simpati masyarakat Muslim. Selain itu, Jepang mengizinkan berdirinya berbagai organisasi Islam seperti Majelis Islam A’la Indonesia (MAI), Masyumi, Hizbullah, dan Sekolah Tinggi Islam. Walaupun organisasi-organisasi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan mobilisasi massa dan strategi perang

Jepang, keberadaannya turut memperkuat jaringan sosial dan pendidikan Islam di Indonesia (Agustang et al., 2023).

Pada aspek kurikulum, Jepang melakukan penyederhanaan materi pelajaran dan menyesuaikannya dengan kebutuhan perang. Pendidikan yang menekankan disiplin, loyalitas, dan semangat kerja memperoleh perhatian lebih besar. Namun demikian, pesantren dan madrasah tetap mempertahankan pengajaran ilmu-ilmu agama sebagai inti pendidikan. Metode tradisional seperti halaqah masih digunakan, meskipun mulai dipadukan dengan sistem pembelajaran yang lebih terstruktur. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang juga mulai diterapkan dalam proses pembelajaran (Amelia et al., 2026).

Meskipun berlangsung relatif singkat, masa pendudukan Jepang memberikan dampak penting bagi perkembangan pendidikan Islam. Pengalaman para ulama dalam mengelola organisasi dan birokrasi semakin meningkat, sementara pembentukan organisasi seperti Hizbullah melahirkan kader-kader Muslim yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Selain itu, terbentuknya jaringan ulama dan tokoh Islam di berbagai daerah menjadi modal penting dalam pengembangan pendidikan Islam dan pembangunan bangsa setelah Indonesia merdeka. Dengan demikian, kebijakan Jepang secara tidak langsung turut memperkuat kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia (Agustang et al., 2023).

Era Kemerdekaan dan Orde Lama: Negosiasi dalam Negara Baru (1945 – 1966)

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi titik awal penting bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Setelah mengalami berbagai keterbatasan pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, lembaga-lembaga pendidikan Islam memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berkembang. Pesantren, madrasah, surau, langgar, dan majelis taklim kembali menjalankan fungsi pendidikannya sebagai pusat pembelajaran agama, pembentukan karakter, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Pada masa awal kemerdekaan, lembaga pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam menyebarkan ilmu keagamaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan semangat nasionalisme dan mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. Para ulama, kiai, dan tokoh pendidikan Islam memiliki kontribusi besar dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan perjuangan demi kelangsungan negara yang baru berdiri (Nilawati et al., 2023).

Dalam proses pembentukan negara, muncul berbagai perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara serta posisi Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perdebatan tersebut menghasilkan kompromi nasional yang menjadikan

Pancasila sebagai dasar negara dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Jaminan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 29 tentang kebebasan beragama dan Pasal 31 tentang hak memperoleh pendidikan. Kedua pasal tersebut menjadi landasan konstitusional yang penting bagi penyelenggaraan pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam. Dengan adanya jaminan tersebut, pendidikan Islam memperoleh legitimasi yang kuat untuk berkembang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Kesadaran pemerintah terhadap pentingnya pendidikan Islam mulai terlihat melalui berbagai kebijakan yang mendukung keberadaan lembaga pendidikan keagamaan. Salah satu langkah awal dilakukan melalui maklumat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada akhir tahun 1945 yang mendorong pengembangan pendidikan di langgar, surau, masjid, dan madrasah. Selain itu, pemerintah juga dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada madrasah dan pondok pesantren karena lembaga-lembaga tersebut dipandang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah diakui sebagai bagian penting dari upaya pembangunan bangsa dan pencerdasan kehidupan masyarakat (Munawwarah, 2025).

Perkembangan yang lebih signifikan terjadi dengan dibentuknya Kementerian Agama pada 3 Januari 1946. Kehadiran kementerian ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya negara memiliki lembaga resmi yang bertanggung jawab mengelola urusan keagamaan dan pendidikan agama secara nasional. Melalui Kementerian Agama, pemerintah mulai melakukan pembinaan terhadap madrasah, pesantren, dan pendidikan agama di sekolah umum. Langkah ini memperlihatkan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional tanpa menghilangkan karakteristik dan nilai-nilai keislaman yang telah berkembang di masyarakat.

Upaya pembinaan pendidikan Islam semakin diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur bantuan sarana, prasarana, dan dukungan operasional bagi madrasah. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa madrasah harus mengajarkan mata pelajaran umum sekurang-kurangnya sepertiga dari keseluruhan jam pelajaran. Kebijakan ini menjadi langkah awal integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum, sehingga lulusan madrasah tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang baik tetapi juga menguasai pengetahuan umum yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selanjutnya, penguatan regulasi pendidikan Islam dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Regulasi ini menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Kebijakan tersebut memperluas akses pendidikan agama bagi peserta didik dan mempertegas posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan formal nasional. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga pendidik, kurikulum yang belum seragam, dan minimnya sarana pendidikan, berbagai kebijakan pada masa awal kemerdekaan telah menjadi fondasi penting bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Era Orde Baru: Modernisasi dan Kontrol (1966 – 1998)

Masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 merupakan periode penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pada masa ini, pemerintah menerapkan sistem pendidikan yang bersifat sentralistik dengan tujuan mendukung pembangunan nasional, menjaga stabilitas politik, serta memperkuat integrasi bangsa. Pendidikan diposisikan tidak hanya sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai instrumen untuk menanamkan ideologi negara. Berbagai program seperti Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dimasukkan ke dalam kurikulum nasional sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter warga negara yang sesuai dengan visi pembangunan Orde Baru (Yuningsih, 2015).

Di tengah kuatnya orientasi politik dan ideologi negara, pendidikan agama tetap memperoleh perhatian yang cukup besar. Pemerintah menetapkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966. Kebijakan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berkembang di lingkungan pesantren dan madrasah, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan formal yang diselenggarakan oleh negara. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang pendidikan agama sebagai sarana penting dalam pembentukan moral dan karakter bangsa.

Perkembangan pendidikan Islam semakin diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam karena menetapkan penyeteraan madrasah dengan sekolah umum. Melalui kebijakan tersebut, kurikulum madrasah

disusun dengan mengombinasikan mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum sehingga lulusan madrasah memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. SKB Tiga Menteri memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas madrasah, memperluas akses pendidikan, serta memperkuat posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Yuningsih, 2015).

Pada bidang pendidikan tinggi Islam, perkembangan yang terjadi juga cukup signifikan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang merupakan hasil penggabungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) berkembang menjadi pusat pendidikan tinggi Islam yang berpengaruh di Indonesia. IAIN berperan penting dalam mencetak ulama, akademisi, guru agama, birokrat, dan intelektual Muslim yang berkontribusi dalam pembangunan nasional. Selain menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman, IAIN juga menjadi wadah bagi berkembangnya pemikiran Islam yang moderat dan adaptif terhadap perubahan sosial. Melalui berbagai fakultas dan program studi yang dimilikinya, IAIN berhasil memperkuat posisi pendidikan tinggi Islam sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional (Nurhidaya et al., 2022).

Di sisi lain, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia juga mengalami berbagai perubahan pada masa Orde Baru. Pada awal periode ini, pesantren menghadapi tantangan akibat kebijakan pemerintah yang cenderung melakukan sentralisasi pendidikan. Namun, setelah diterbitkannya SKB Tiga Menteri Tahun 1975, pesantren memperoleh peluang yang lebih besar untuk beradaptasi dengan sistem pendidikan nasional. Banyak pesantren mulai mendirikan madrasah dan sekolah formal yang mengikuti kurikulum pemerintah tanpa meninggalkan tradisi pendidikan Islam yang telah lama berkembang. Langkah ini memungkinkan pesantren mempertahankan identitas keislamannya sekaligus memperoleh pengakuan yang lebih luas dalam sistem pendidikan nasional (Hamzah, 2014).

Secara keseluruhan, masa Orde Baru merupakan periode yang menandai semakin kuatnya integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Melalui kebijakan pendidikan agama, penyetaraan madrasah, penguatan pendidikan tinggi Islam, serta modernisasi pesantren, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meskipun berada dalam sistem pemerintahan yang sentralistik dan berada di bawah kontrol politik yang kuat, lembaga-lembaga pendidikan Islam mampu beradaptasi dan terus berkembang. Oleh karena itu, masa Orde Baru dapat dipandang sebagai fase penting yang memperkuat legitimasi dan

posisi pendidikan Islam sebagai bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional di Indonesia.

Era Reformasi: Demokratisasi dan Desentralisasi (1998 – Sekarang)

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menjadi momentum penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik yang ditandai dengan meningkatnya demokratisasi, transparansi, serta desentralisasi. Dalam sektor pendidikan, perubahan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan Islam yang selama ini menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

Salah satu kebijakan penting pada masa Reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan. Melalui kebijakan desentralisasi tersebut, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam lainnya memperoleh peluang yang lebih luas untuk berkembang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, penguatan posisi pendidikan Islam semakin terlihat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan agama merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini juga memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap eksistensi madrasah dan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, sehingga kedudukan pendidikan Islam semakin kuat secara hukum dan kelembagaan (Hafidha et al., 2024).

Perkembangan penting lainnya pada Era Reformasi terjadi dalam lingkungan pendidikan tinggi Islam. Seiring dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin kompleks, perguruan tinggi Islam dituntut untuk tidak hanya berfokus pada pengembangan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga mengembangkan berbagai disiplin ilmu modern. Kondisi tersebut mendorong transformasi sejumlah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Transformasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum seperti sains, teknologi, ekonomi, ilmu sosial, dan humaniora. Melalui perubahan tersebut, perguruan tinggi Islam diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik yang luas, pemahaman

keagamaan yang mendalam, serta kemampuan bersaing di tingkat nasional maupun global (Haqqi et al., 2024).

Transformasi IAIN menjadi UIN tidak hanya berupa perubahan nama kelembagaan, tetapi juga mencakup reformasi kurikulum, penguatan penelitian, peningkatan kualitas dosen, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Berbagai UIN mulai mengembangkan pendekatan integrasi ilmu yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Perubahan ini ditandai dengan berdirinya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002, diikuti oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2004. Kehadiran UIN menjadi simbol modernisasi pendidikan tinggi Islam yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa meninggalkan identitas keislamannya (Haqqi et al., 2024).

Selain pendidikan tinggi, pesantren juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada Era Reformasi. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren melakukan berbagai inovasi untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Banyak pesantren mulai mengintegrasikan kurikulum keagamaan dengan ilmu pengetahuan umum, teknologi informasi, kewirausahaan, dan bahasa asing. Modernisasi tersebut memungkinkan santri memiliki kompetensi yang lebih luas sehingga mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan masyarakat modern. Tidak sedikit pesantren yang kemudian mendirikan sekolah formal, lembaga pendidikan vokasi, hingga perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan Islam (Hafidha et al., 2024).

Penguatan eksistensi pesantren semakin nyata dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini memberikan pengakuan formal terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui regulasi tersebut, pesantren memperoleh kepastian hukum, akses yang lebih luas terhadap dukungan pemerintah, serta pengakuan terhadap hasil pendidikan yang diselenggarakannya. Kehadiran Undang-Undang Pesantren menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam karena menempatkan pesantren sebagai salah satu pilar utama pendidikan nasional. Dengan demikian, Era Reformasi dapat dipandang sebagai periode yang memperkuat integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional melalui reformasi regulasi, transformasi pendidikan tinggi Islam, serta modernisasi

dan penguatan kelembagaan pesantren yang semakin adaptif terhadap perkembangan zaman (Taufik et al., 2025).

CONCLUSION

Berdasarkan kajian historis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berlangsung melalui proses yang panjang, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan sosial, politik, serta budaya pada setiap periode sejarah. Pada masa pra-kolonial, pendidikan Islam berkembang melalui masjid, surau, langgar, dan pesantren yang berperan sebagai pusat pembelajaran agama sekaligus pembentukan karakter masyarakat Muslim. Memasuki masa kolonial Belanda, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan akibat dominasi sistem pendidikan Barat yang sekuler, namun kondisi tersebut justru mendorong lahirnya berbagai inovasi dan pembaruan kelembagaan, termasuk berkembangnya madrasah modern. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan Islam memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang, terutama dalam aspek organisasi dan penguatan jaringan ulama. Setelah kemerdekaan, pemerintah mulai memberikan pengakuan dan dukungan formal melalui pembentukan Kementerian Agama serta integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, pada era Orde Baru, pendidikan Islam mengalami proses standardisasi dan modernisasi melalui berbagai kebijakan pendidikan. Adapun pada era Reformasi, pendidikan Islam berkembang semakin pesat melalui desentralisasi pendidikan, transformasi IAIN menjadi UIN, modernisasi pesantren, serta pengesahan Undang-Undang Pesantren. Keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman sebagai landasan utamanya.

REFERENCES

- A. Rezky Nurhidaya, Azaz Akbar, Ashar, Ince Prabu, dan Syarifuddin Ondeng. 2022. "PERKEMBANGAN PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA." *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2(1):24–35. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/view/7783>.
- Agnes Secilia Simamora, Dkk. 2026. "PROSES ISLAMISASI DI NUSANTARA PADA ABAD KE-13 HINGGA KE-16: PERAN JALUR PERDAGANGAN, ULAMA, DAN INTERAKSI BUDAYA DALAM PENYEBARAN ISLAM." *Pendas : Jurnal*

- Ilmiah Pendidikan Dasar* 11:194–201.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/43806>.
- Agustang, Bahaking Rama, Muhammad Yahdi. 2023. "Pendidikan Islam Masa Penajahan Kemerdekaan Dan Dinamika Kebijaksanaan." *PIJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 1(3):287–301.
doi:<https://doi.org/10.58540/pijar.v1i3.357>.
- Andi Reski Amelia, Fathir Qadri Syam, Idrus L. 2026. "Transformasi Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia (1942-1945)." *Scripta Humanika: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1(4).
doi:<https://doi.org/10.65310/tr73bw29>.
- Ardianti Yunita Putri, Elia Mariza, Alimni. 2023. "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahirnya Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia, Sejarah Perkembangan Pesantren/ Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini)." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3(Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)). <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/1140>.
- Azzahra, Nasywa Alifia, Ria Astuti Safitri, and Hasna Dewi. 2025. "Pendidikan Islam Indonesia: Transformasi Lembaga Dan Kurikulum." 01(01):10–17.
<https://ejurnal.iims.ac.id/index.php/pandai/article/view/234/159>.
- Hamzah, Syeh H. 2014. "Perkembangan Pesantren Di Indonesia (Era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi)." *Syamil Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)* 2(1):14. doi:<https://doi.org/10.21093/sy.v2i1.490>.
- Haqqi, Atiatul, Suaidi Asyari, and Minnah El Widdah. 2024. "Transformasi IAIN Menuju UIN: Analisis Kebijakan Dan Implikasinya Dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan." 8:35836–42.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/19297/13932>.
- Hery Agung Setyawan, Moh. Roqib. 2025. "MEMBANGUN PERADABAN: DINAMIKA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM MELALUI SURAU,

- MASJID, DAN PESANTREN DI INDONESIA.” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10:289–315.
- M.Taufik Ismail Siregar, Sholihah, M. RizqyRomadho. 2025. “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren : Studi Kritis Terhadap UU No . 18 Tahun 2019.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* (Vol. 3 No. 3 (2025): 2025):1016–25. doi:<https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1816>.
- Mei Nuri Hafidha Sari, Ewiniarti Hawa, Febby Aulia Sari, Mahfud Ifendi. 2024. “Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Era Reformasi.” *ISEDU : Islamic Education Journal (Jurnal Pendidikan Islam)* 2(Vol. 2 No. 2 (2024): DESEMBER). doi:<https://doi.org/10.59966/isedu.v2i2.1516>.
- Muhammad Fakhriansyah, Intan Ranti Permatasari Patoni. 2019. “Akses Pendidikan Bagi Pribumi PadaPeriode Etis(1901-1930).” *Jurnal PENDIDIKAN SEJARAH* 8(2):122–47. doi:<https://doi.org/10.21009/JPS.082.03>.
- Muhammad Iqbal Ghafiri Enhas, Alfian Nawaziru Zahara, Bastri Bastri. 2023. “Sejarah, Transformasi, Dan Adaptasi Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 13. doi:<https://doi.org/10.33367/ji.v13i3.4457>.
- Muhammad Sirojuddin, Andien Imel Julya, Durrotun Nasihah, Maulida Azka Aulia. 2025. “Dinamika Kurikulum Pesantren Di Indonesia.” *JOIES: Journal of Islamic Education Studies* 10(June 2025). doi:<https://doi.org/10.15642/joies.2025.10.1.105-122>.
- Munawwarah, Zulfatmi2. 2025. “Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Melalui Jalur Madrasah Pasca Kemerdekaan.” 07(1):52–62. <https://journalversa.com/s/index.php/jipp/article/view/543/547>.
- Rohani, Mahdar Ernita, Salmiah. 2022. “PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL BELANDA (Kasus Muhammadiyah Dan NU).” *NUSANTARA; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 18(2). doi:<http://dx.doi.org/10.24014/nusantara.v18i2.21483>.

- Sonia Sinta Salsabila , Yazida Ichsan , Adinda Icha Rohmadani, Safira Rona Mahmudah. 2021. "Implikasi Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Orde Lama, Baru, Dan Reformasi." *Tarbiyya: Jurnal Pendidikan Islam* 8(2):8–15. [https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/tar/article /view/1753](https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/tar/article/view/1753).
- Sri Nilawati, Hifza, Andi Achruh. 2023. "Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan." 2(1):108–15. doi:<https://doi.org/10.58540/pijar.v2i1.492>.
- Susmihara. 2018. "Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara." *Rihlah Jurnal Sejarah Dan Budaya* 06(Vol. 6 No. 1 (2018): History and Culture). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/5454>.
- Yuningsih, Heni. 2015. "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru." *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2015:175–94.